

**LAPORAN
PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUMDA BPR KUNINGAN
TAHUN 2025**

PERUMDA BPR KUNINGAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 88 Telp./Fax (0232) 8880207

Kabupaten Kuningan

DAFTAR ISI

		<i>Halaman</i>
BAB I	PENJELASAN UMUM	1
BAB II	LAPORAN TRANSPARANSI PELAKAANAAN TATA KELOLA	2
	A. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola.....	2
	B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	2
	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	2
	2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.	4
	3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	5
	C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	6
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR.....	6
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.....	6
	D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	6
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain.....	6
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain.....	7
	E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.....	7
	1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR.....	7
	2. Hubungan Keuangan Dewan Komisaris Pada BPR.....	7
	F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.....	7
	1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR.....	8
	2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.....	8
	G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	8
	H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	9
	I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.....	9
	J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	10
	K. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>).	10
	L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	10
	M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	11
	N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain.	11

BAB I PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di Perumda BPR Kuningan pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

Perumda BPR Kuningan memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga Perumda BPR Kuningan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Kuningan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada Perumda BPR Kuningan didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perumda BPR Kuningan.

Perumda BPR Kuningan telah beroperasi selama 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi lembaga keuangan terpercaya dalam mendukung perekonomian masyarakat melalui pelayanan jasa keuangan yang inovatif berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam penerapan Tata Kelola, Perumda BPR Kuningan selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, Perumda BPR Kuningan terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II
LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola.

Nama BPR	PERUMDA BPR KUNINGAN
Alamat	Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat.
Nomor Telepon	(0232) 8880207
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Predikat Komposit	3
Predikat Komposit Kesimpulan / Penjelasan Peringkat Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola.	CUKUP BAIK Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

B: Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	Dodo Warda, SE, MM
	NIK	3208311111670001
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perumda BPR Kuningan. 2. Wajib mengelola Perumda BPR Kuningan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perumda BPR Kuningan dan peraturan perundang undangan. 3. Wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 4. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas	

	<p>Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM. 6. melaksanakan manajemen Perumda BPR Kuningan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan; b. pengurusan/pengelolaan; dan c. pengawasan kegiatan operasional. 7. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Kuningan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; 8. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Perumda BPR Kuningan kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; 9. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Kuningan; 10. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan 11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
2.	Nama	Deni Heryana, S.sos
	NIK	3208090403740003
	Jabatan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan Perumda BPR Kuningan telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan / atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau peraturan perundang-undangan lain. 2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. 3. Memantau dan menjaga kepatuhan Perumda BPR Kuningan terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh Perumda BPR Kuningan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. 4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 5. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Perumda BPR Kuningan. 6. Melaporkan kepada Dewan Pengawas secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi Perumda BPR Kuningan 	

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Direksi telah mengupayakan target yang tercantum dalam RBB tahun 2024 untuk dapat dicapai.
2. Direksi telah melakukan tindak lanjut atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan Audit Intern
3. Direksi telah melaksanakan rekomendasi berupa pembuatan visi dan misi Perumda BPR Kuningan tahun 2024-2027, melaksanakan promosi / mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan.
4. Rencana bisnis bank tahun 2025 telah selesai disusun dan disyahkan oleh KPM serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku

Penjelasan Lebih Lanjut :

1. Direksi diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Sdr. Deni Heryana, S.Sos merupakan Direktur Operasional yang merangkap jabatan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris.

No.		Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	
	NIK	3208090304580005	
	Jabatan	Ketua Dewan Pengawas	
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 2. Dewan Pengawas wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Pengawas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perumda BPR Kuningan. 5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3), Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perumda BPR Kuningan, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit Perumda BPR Kuningan; dan b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada point (5) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Perumda BPR Kuningan. 			

	<p>7. Dewan Pengawas wajib :</p> <p>a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan</p> <p>b. membuat dan memelihara risalah rapat.</p> <p>8. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada point (3) dilakukan secara :</p> <p>a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan</p> <p>b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>9. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Perumda BPR Kuningan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas lainnya.</p>
Rekomendasi Dewan Pengawas Kepada Direksi :	
	<p>1. Evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit tahun buku 2024.</p> <p>2. Rekomendasi pembuatan Visi dan Misi Perumda BPR Kuningan tahun 2024-2027 dan pengisian jabatan kosong.</p> <p>3. kajian penerapan 6 hari kerja.</p> <p>4. Tindak lanjut pemeriksaan OJK tahun 2025.</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :	
	Dewan Pengawas diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (Jika Ada).

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite.

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	--
	Program Kerja	--
	Realisasi	--
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Program Kerja	--
	Realisasi	--
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Program Kerja	--
	Realisasi	--
	Jumlah Rapat	--

Keterangan :

Sesuai Pasal 59 POJK No.9 Tahun 2024 Dewan Komisaris tidak membentuk komite, karena modal inti Perumda BPR Kuningan masih dibawah Rp. 50 Milyar.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK	Nama	Keahlian	Komite				Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Pada Perumda BPR Kuningan.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perumda BPR Kuningan.

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dodo Warda, SE, MM	3208311111670001	Rp0	0%
2.	Deni Heryana, S.Sos	3208090403740003	Rp0	0%
<i>Penjelasan Lebih Lanjut :</i>				
Anggota Direksi tidak memiliki saham di Perumda BPR Kuningan, karena kepemilikan saham 100% milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perumda BPR Kuningan.

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	3208090304580005	Rp0	0%
<i>Penjelasan Lebih Lanjut :</i>				
Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki saham di Perumda BPR Kuningan, karena kepemilikan saham 100% milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.				

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dodo Warda, SE, MM	3208311111670001	-	-	0%
2.	Deni Heryana, S.sos	3208090403740003	-	-	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada bank lain dan perusahaan lain.

2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain.

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	3208090304580005	-	-	0%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dewan Pengawas tidak memiliki saham pada Bank lain dan perusahaan lain.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dodo Warda, SE, MM	3208311111670001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Deni Heryana, S.sos	3208090403740003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Anggota Direksi Perumda BPR Kuningan tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, dewan komisaris dan pemegang saham.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	3208090304580005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs. H. Uca Somantri, M.Si	3208162002650003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut :

Anggota Dewan Komisaris Perumda BPR Kuningan tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, dewan komisaris dan pemegang saham.

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPR.

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dodo Warda, SE, MM	3208311111670001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2.	Deni Heryana, S.sos	3208090403740003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<i>Penjelasan Lebih Lanjut :</i>					
Anggota Direksi Perumda BPR Kuningan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, dewan komisaris dan pemegang saham					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	3208090304580005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs. H. Uca Somantri, M.Si	3208162002650003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
<i>Penjelasan Lebih Lanjut :</i>					
Anggota Dewan Komisaris Perumda BPR Kuningan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, dewan komisaris dan pemegang saham.					

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp291.168.000	2	Rp366.113.088
2.	Tunjangan	2	Rp824.493.409	2	Rp75.476.808
3.	Tantiem	2	Rp73.294.200	2	Rp29.318.639
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp1.188.955.609		Rp470.908.535
<i>Penjelasan Lebih Lanjut :</i>					
Tantiem Direksi dan Dewan Pengawas berasal dari tantiem perhitungan laba usaha tahun 2023.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan Tunjangan Perumahan (2)	Tidak ada
2.	Transportasi	Masing-masing Anggota Direksi Mendapatkan fasilitas kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat (2)	Masing-masing Anggota Komisaris mendapat fasilitas kendaraan berupa 1 unit kendaraan bermotor roda

			empat (2)
3.	Asuransi Kesehatan	Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan tunjangan komunikasi (2), Masing-masing Anggota Direksi mendapatkan fasilitas Asuransi Jiwa dari Asuransi Equity (2)	Masing-masing Anggota Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas tunjangan komunikasi (2), Masing-masing Anggota Dewan Pengawas mendapatkan fasilitas asuransi jiwa dari Asuransi Equity (2)
<i>Penjelasan Lebih Lanjut :</i>			
Fasilitas perumahan untuk direksi diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan dan diberikan setiap bulan. Fasilitas komunikasi untuk direksi dan dewan komisaris diberikan dalam bentuk tunjangan komunikasi / paket data dan diberikan setiap bulan.			

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.28 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.21 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.13 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.42 : 1
<i>Penjelasan Lebih Lanjut :</i>	
Gaji yang dimaksud adalah merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan- tunjangan selama tahun 2024.	

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun.

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	2 Juli 2025	4	Pembahasan Promomosi dan Mutasi
2.	19 Agustus 2025	4	Pembahasan Pelaksanaan Seleksi Promosi Jabatan
3.	8 September 2025	7	Pembahasan Produk Tabungan Pasti
4.	10 September 2025	14	Pembahasan Surat Edaran Mendagri tentang TNT.
5.	30 September 2025	3	Rencana Pembelian Seragam Pengurus Pegawai
6.	4 November 2025	18	Rencana Penyusunan RBB 2026
<i>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Rapat pembahasan promosi dan mutase dihadiri oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Kepala Bagian Umum, SDM dan Anggaran. 			

- Rapat Pembahasan Surat Edaran Kemendagri dihadiri oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif Kantor Pusat.
- Rapat Pembahasan Penyusunan Anggaran pengangkatan pegawai dihadiri oleh Dewan pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM	3208090304580005	6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tingkat kehadiran Ketua Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas dalam pelaksanaan rapat sebesar 100%.					

K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
<p>Dalam tahun 2025 tidak terdapat penyimpangan internal.</p> <p>Pengendalian Internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi fraud dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang tujuannya untuk membantu Perumda BPR Kuningan mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu pengendalian internal juga berfungsi agar kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perumda BPR Kuningan. Untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris telah mengangkat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pejabat Eksekutif Audit Internal untuk melakukan pengawasan operasional Perumda BPR Kuningan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. PEAI bersifat independen terhadap fungsi operasional Perumda BPR Kuningan, penyampaian laporan hasil pemeriksaan di Kantor Pusat, Kantor Cabang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan strategi anti fraud. 								

L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selama tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi Perumda BPR Kuningan.

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selama Tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

N. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK / NPWP	Jumlah (Rp)
1.	26 Agustus 2025	Sosial	Bantuan Pembuatan Embung Kahutla Blok Batu Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan	Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan		Rp35.000.000

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik :

Kegiatan Sosial yang dilakukan Perumda BPR Kuningan tahun 2025 yaitu program untuk membantu masyarakat berupa kegiatan sosial atau lingkungan yang pelaksanaannya tidak terprogram dan bersifat bantuan atau juga disebut dengan program non kemitraan.

Masing-masing berupa bantuan pembuatan embung penampung air yang berguna untuk menanggulangi bahaya kebakaran hutan Gunung Ciremai.

Kuningan, Februari 2026
PERUMDA BPR KUNINGAN



Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM
Ketua Dewan Pengawas



H. Dodo Warda, SE, MM
Direktur Utama